

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN  
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DALAM PEMBUATAN  
PERATURAN DAERAH  
(Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI  
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :  
Ryki Setiawan  
NPM : 1521020069  
Prodi : *Siyasah Syar'iyah***



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2020M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN  
FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DALAM PEMBUATAN  
PERATURAN DAERAH  
(Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syariah**



**Oleh :  
Ryki Setiawan  
NPM : 1521020069  
Prodi : *Siyasah* (Hukum Tata Negara)**

**Pembimbing I : Dra. Firdaweri., M.H.I  
Pembimbing II : Agustina Nurhayati., S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2020M**

## ABSTRAK

Kabupaten Lampung Utara terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana juga terdapat di Kabupaten-kabupaten lain seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh selama periode 2014-2019 dari total 90 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Promperda) periode 2014-2019 hanya terdapat 29 Raperda yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara. Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Periode 2014-2019 dalam pembuatan Peraturan Daerah? dan 2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Periode 2014-2019 dalam pembuatan Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Ingin mengetahui sejauh mungkin tentang pelaksanaan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Periode 2014-2019 dalam pembuatan Peraturan Daerah 2. Ingin mengetahui sejauh mungkin tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Periode 2014-2019 dalam pembuatan Peraturan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *field research* dimana penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara *deduktif*. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan Perda sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya baik itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 tahun 2018. Namun, belum memenuhi beberapa aspek berikut diantaranya a. aspek *historys* yakni hampir semua produk rancangan Peraturan Daerah berasal dari usulan pihak eksekutif, b. aspek *policy* yakni perda yang dihasilkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan bukan masyarakat, dan c. aspek *representative* yakni kurang bersikap pro aktif serta tidak memiliki komitmen dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. 2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan Perda masuk kedalam ranah *siyasah dusturiyah*, karena termasuk dalam bagian administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara, dalam *fiqh siyasah* juga mengatakan tugas yang terpenting dari DPRD adalah membuat undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan hidup masyarakat Kabupaten Lampung Utara, dalam pembuatan undang-undang masalah peningkatan ekonomi masyarakat, supaya kemaslahatan masyarakat tercapai.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

**SURAT PERYATAAN**

*Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ryki Setiawan

NIM : 1521020069

Jurusan/Prodi : *Siyasah* / Hukum Tatanegara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Studi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara).*" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 10 Juli 2020

Penulis

Materai  
6000

Ryki Setiawan  
NPM : 1521020069





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung. Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

**Judul** : Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Pelaksanaan Fungsi  
Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam  
Pembuatan Peraturan Daerah (Studi di Kantor Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara)

**Nama** : Ryki Setiawan  
**NPM** : 1521020069  
**Jurusan** : *Siyash*  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dra. Firdaweri, M.H.I**

**NIP. 195509191982032004**

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**NIP. 197408162003122004**

**Ketua Jurusan**

**Frenki, M.St.**

**NIP. 198001152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung, Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Studi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara)*" ditulis oleh **Ryki Setiawan, NPM : 1521020069** Program Studi **Hukum Tata Negara** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada hari/tanggal :

**Tim Penguji**

**Ketua : Frenki, M.Si**

**Sekretaris : Arif Firki, S.H.I., M.Ag**

**Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**

**Penguji II : Dra. Firdaweri, M.H.I**

**Penguji III : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210219930310002**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمَنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa [4] : 58).*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Sembah sujudku kepada Allah SWT. Dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.
2. Papahku Arifin Harun dan Mamahku Ernani Nur tersayang, yang selalu memberikan Do'a serta dukungan yang tiada henti untuk kesuksesan anaknya, kerja keras kalian untuk mencari rezeki demi menyekolahkan aku sampai bisa menjadi sarjana seperti ini. Ucapan terimakasih kepada Papah dan Mamah, semoga Papah dan Mamah senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu, anakmu berjuang semata-mata untuk membahagiakan dan mengangkat derajat Papah dan Mamah.
3. Kepada pembimbing I Ibunda Dra. Firdaweri., M.H.I dan pembimbing II Ibunda Agustina Nurhayati., S.Ag., M.H., sebagai orang tua ke dua yang telah membimbing, memotivasi serta memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu
4. Almarhummah Wak Ernawati, Paman Opi Riansyah, S.Pd., M.M., Abang Rio Ari Purnama., S.STP., M.M., Minak Qyoko, Abang Pepen, Bung Angga, Kak Bela, Ayuk Rika, Roy Qenedi, Adikku Selvia Distira dan Afrilia Tri Cahyani, yang selalu memotivasi, beserta keluarga besar tercinta lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya, kalian adalah keluarga terbaik yang Allah SWT berikan kepadaku.



5. Kepada Adinda Zafira Ahadis, S.E seorang wanita yang selalu menemani dan memberika semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi.
6. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba Ilmu pengetahuan yang selalu kubanggakan.
7. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah, Kanda Prof. Dr. H. Idzan Fautanu, M.A., Sidi H. Imam Syuhada, S.H., Dayeng M. Tio Aliansyah, S.H.,M.H., Kanda Dr. Gandhi Liyorba Indra, M,Ag., Kanda Yuhadi, S.H.I., Kanda Hermansyah, S.H.I.,M.H., Kanda Najih Mustofa., S.H.,M,Pd., Kanda Hermawan., S.H.I, M.H., Kanda Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I., Serta Kanda Yunda lainnya, segenap saudara-saudara Pengurus periode 2018-2019 dan seluruh kader HMI Komisariat Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta saudara-saudara Kotabumi yang selalu memberikan Do'a dan motivasi yang sangat berharga untuk penulis menyelesaikan skripsi.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ryki Setiawan, lahir di Kotabumi, 01 Desember 1996. Anak pertama dari tiga bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Arifin Harun dan Ibu Ernani Nur.

Pendidikan pertama dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Kelapa Tujuh, Kabupaten Lampung Utara selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, selesai pada Tahun 2012, dan dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara selesai pada tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Jurusan *Siyasah* (Hukum Tata Negara) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Angkatan tahun 2015.

Bandar Lampung, 10 Juli 2020

Ryki Setiawan  
NPM : 1521020069

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, serta tak lupa dihaturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Studi DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode 2014-2019)*".

Adapun maksud dari skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 di jurusan Siyasah Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini menyampaikan perasaan terdalam kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyusun skripsi ini. Kepada mereka, dengan segenap kerendahan hati ingin menghaturkan rasa bangga dan terima kasih tak terhingga:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Mukri., M. Ag, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin., M.H. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (UIN) Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Bapak Frenki., M.S.I Ketua Jurusan *Siyasah* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dra. Firdaweri., M.H.I pembimbing I dan Ibunda Agustina Nurhayati., S.Ag., M.H., pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menjadi mahasiswa.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan keritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT. Menjadikannya sebagai amal ibadah yang akan mendapat ganjaran disisi-Nya, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 10 Juli 2020

Penulis

Ryki Setiawan  
NPM: 1521020069



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
 <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Signifikansi Penelitian .....	11
H. Metode Penelitian.....	12
 <b>BAB II    DPRD DALAM PANDANGAN <i>FIQH SIYASAH</i> DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Landasan Teori	
1. DPRD dalam Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i>	
a. Pengertian <i>Ahl Al-Hall wa Al-Aqd</i> .....	25
b. Dasar Hukum <i>Ahl Al-Hall wa Al-Aqd</i> .....	29
c. Tugas, fungsi dan Wewenang <i>Ahl Al-Hall wa Al-Aqd</i> .....	31
2. DPRD dalam Pandangan Hukum Positif	
a. Pengertian DPRD.....	38
b. Kedudukan dan Fungsi DPRD.....	41
c. Tugas dan Wewenang DPRD.....	49
B. Tinjauan Pustaka .....	50
 <b>BAB III    PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH</b>	
A. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Lampung Utara	

1. Sejarah DPRD Kabupaten Lampung Utara.....	55
2. Visi dan Misi .....	57
3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	58
4. Susunan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Lampung Utara Periode 2014-2019 .....	65
5. Susunan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Lampung Utara Periode 2019-2024 .....	69
B. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lampung Utara.....	72
<b>BAB IV ANALISIS</b>	
A. Pelaksanaan Fungsi Legislasi pada DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode 2014-2019 dalam Pembuatan Peraturan Daerah.....	81
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi pada DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode 2014-2019 dalam Pembuatan Peraturan Daerah..	92
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Rekomendasi.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	100
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	105
Lampiran 1 Surat Keterangan Riset	
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	
Lampiran 3 Daftar Sampel Penelitian	
Lampiran 4 Kartu Konsultasi	
Lampiran 5 Dokumentasi Pendukung (Foto)	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jumlah Produk Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019 .....	6
2. Sampel Penelitian.....	16
3. Komisi dan Bidang Tugas DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode 2014-2019 .....	66
4. Komposisi Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode 2014-2019 .....	68
5. Komisi dan Bidang Tugas DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode 2019-2024 .....	69
6. Komposisi Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Utara Periode 2019-2024 .....	71
7. Data Perbandingan Raperda Yang Disahkan menjadi Perda Periode 2014-2019 .....	76
8. Daftar Perda yang Disahkan oleh DPRD Kabupaten Lampung Utara pada periode 2014-2019.....	76



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Proses Pelaksanaan Fungsi Legislasi .....	75
2. Data Raperda Dan Perbandingan Usulan Raperda Yang Dijajukan Pemerintah Dan Anggota Dewan Serta Jumlah Perda yang Disahkan Selama Periode 2014-2019 .....	75





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai "**Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Studi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara)**", dan untuk menghindari kerancuan atau kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, perlu kiranya penyusun jelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul sebagai berikut:

##### 1. *Tinjauan Fiqh Siyasah*

- a. Tinjauan merupakan bentuk pemeriksaan secara teliti, penyelidikan, kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data, pengolahan serta analisa terhadap data secara sistematis dan objektif dalam rangka memecahkan sebuah persoalan.<sup>1</sup>
- b. *Fiqh siyasah* merupakan ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik didalamnya terdapat pembahasan terkait dengan seluk beluk pengaturan kepentingan dalam kehidupan umat manusia secara umum serta secara khusus kepada Negara, didalamnya memuat mengenai penetapan hukum, aturan, serta kebijakan yang dibuat oleh penguasa yang berlandaskan kepada ajaran-ajaran Islam, dimana tujuan utamanya adalah perwujudan dari kemaslahatan umat sekaligus

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia pustaka, 2011), h. 1470.

menghindari berbagai bentuk kemudharatan yang senantiasa dapat timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan *fiqh siyasah* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam

## **2. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

- a. Pelaksanaan adalah sebuah tindakan dari sebuah rencana atau rancangan yang sudah disusun terlebih dahulu secara matang dan terperinci.<sup>3</sup>
- b. Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam pasal 69 ayat (1) jo Pasal 70 Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fungsi legislasi merupakan fungsi membentuk Undang-Undang.<sup>4</sup>
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan di daerah dan merupakan unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, selain itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki fungsi lain yakni fungsi legislasi, anggaran serta pengawasan, terkait dengan hal tersebut maka Dewan

<sup>2</sup>A. Djazuli, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2000), h. 42.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar...*, h. 2680.

<sup>4</sup>Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1).

Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas, wewenang serta hak dan kewajiban yang diatur secara konstitusional dan individual.<sup>5</sup>

Jadi yang dimaksud dengan pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada penelitian ini adalah terkait dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam membentuk produk hukum daerah atau Peraturan Daerah (Perda).

### **3. Pembuatan Peraturan Daerah**

- a. Pembuatan adalah kegiatan menciptakan atau memproses sesuatu.<sup>6</sup>
- b. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah.<sup>7</sup>

Jadi yang dimaksud dengan pembuatan Peraturan Daerah pada penelitian ini ialah produk hukum berupa Peraturan daerah yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara bersama dengan pihak eksekutif (Kepala daerah kabupaten Lampung Utara) pada periode masa jabatan 2014-2019.

### **4. Studi di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Utara**

- a. Studi adalah kajian, telaah, penelitian dan penyelidikan ilmiah.<sup>8</sup>
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara merupakan lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam melakukan

---

<sup>5</sup>Bambang Yudhoyono, *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 156.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, h. 5470.

<sup>7</sup>Bambang Yudhoyono, *Otonomi Daerah, ...*, h. 160.

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, h. 681.

penyusunan Peraturan Daerah bersama dengan lembaga eksekutif dalam hal ini adalah kepala Daerah yakni Bupati Kabupaten Lampung Utara.

Jadi yang dimaksud dengan studi di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Utara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan di lembaga pemerintah tingkat II, yakni Dewan Perwakilan Daerah.

Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Utara dipilih sebagai lokasi penelitian sebab pada periode 2014-2019 jumlah peraturan Daerah yang berhasil disahkan hanya sebanyak 42 Peraturan Daerah dari sebanyak 90 Rancangan Peraturan daerah (Raperda) dimana 61 Raperda berasal dari inisiatif pemerintah dan 29 Raperda berasal dari usulan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan penjelasan istilah tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini secara keseluruhan adalah menganalisis data secara sistematis dan objektif terkait dengan fungsi legislasi yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam membuat Peraturan Daerah (Perda).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Pada dasarnya terdapat dua alasan dalam pemilihan suatu judul penelitian, yaitu alasan obyektif dan subyektif.



### 1. Alasan obyektif

Fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dirasa masih sangat kurang optimal hal ini dapat dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas Peraturan Daerah (Perda) baik yang diusulkan ataupun yang telah disahkan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh selama periode 2014-2019 dari total 90 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Promperda) periode 2014-2019 hanya terdapat 42 Perda yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan data tersebut, diindikasikan bahwa fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung utara belum terlaksana dengan baik.

### 2. Alasan subyektif

Judul tersebut sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Selain itu juga guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi *Siyasah* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hasil observasi pra riset yang dilakukan peneliti di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara, kinerja anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan fungsi legislasi dikategorikan masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya

hak inisiatif anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam mengajukan Raperda sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 1  
Jumlah Produk Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Lampung Utara  
Tahun 2014-2019

<b>Tahun</b>	<b>Raperda</b>	<b>Inisiatif Pemda</b>	<b>Inisiatif DPRD</b>	<b>Jumlah Perda</b>
2014	6	3	3	4
2015	15	9	6	9
2016	14	9	5	8
2017	19	14	5	5
2018	16	11	5	9
2019	20	15	5	7
<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>61</b>	<b>29</b>	<b>42</b>

*Sumber: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara, 2019.*

Tabel di atas menunjukkan bagaimana hak inisiatif anggota DPRD kabupaten Lampung Utara pada periode 2014-2019 dalam mengajukan Raperda. Terlihat pada tabel bahwa dari total sebanyak 90 Raperda yang diajukan, DPRD Kabupaten Lampung Utara hanya mengajukan 29 Raperda sedangkan sisanya sebanyak 61 Raperda merupakan Raperda yang diajukan oleh pemerintah Daerah. Padahal fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang mewakili rakyat.

Fungsi legislasi DPRD pada tingkat daerah pada hakekatnya adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Secara ideal pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang karena pemberian kewenangan dalam menetapkan Peraturan daerah

sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya.<sup>9</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak serta kewajiban DPRD.<sup>10</sup> Dengan dibentuknya undang-undang tersebut seharusnya ada penguatan legislasi DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik.

Pelaksanaan fungsi legislasi sendiri tidak hanya menyangkut pada pembentukan Perda yang semata-mata pro kepada rakyat, namun juga terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap berjalannya sebuah Perda. Maka tentu saja di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masyarakat berharap bahwa produk hukum yang dihasilkan adalah produk hukum yang didasarkan kepada kepentingan masyarakat banyak.

Hal tersebut sangatlah beralasan sebab, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan perwakilan dan perpanjangan tangan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

---

<sup>9</sup>Bandiyah dkk, Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah), *Jurnal FISIP Universitas Udayana* Vol 1 No 2 (Januari, 2014), h. 1.

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 2.

penyusunan Raperda hingga menjadi Perda memiliki pengaruh yang sangatlah besar, sebab diharapkan Perda yang disahkan harus mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat, sehingga menjadikan tujuan yang hendak dicapai melalui pembuatan Perda tersebut dapat terwujud tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana pemerintah daerah (badan eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (badan legislatif) pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama, meskipun demikian terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta hak dan kewajiban antara keduanya terdapat perbedaan. Hubungan kemitraan yang dijalin antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah merupakan perwujudan dari upaya dalam mencapai dan mewujudkan pemerintah daerah yang baik (*good local governance*) yang mana hal ini jugalah yang menjadi tujuan dalam sistem pemerintahan Islam.

Pada pemerintahan Islam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kesamaan fungsi dengan *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* yakni merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memutuskan serta menentukan sesuatu atas nama umat (warga Negara). Dengan demikian maka *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* memiliki fungsi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kemudian disebut juga sebagai dewan perwakilan. *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* merupakan para ahli yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi, mereka juga



diberikan wewenang untuk menetapkan dan mengangkat kepala Negara sebagai pemimpin pemerintahan.

Tujuan utama dari pemerintahan dalam siyasah Islam adalah memperhatikan serta mengurus permasalahan yang terkait dengan persoalan duniawi. Seperti permasalahan terkait dengan penghimpunan dana yang sah dan penyalurannya kepada orang lain, mencegah timbulnya kezaliman dan kerusuhan serta berbagai persoalan lainnya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut bermuara kepada satu hal yakni pemerintah harus mampu mewujudkan dan membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk kepentingan akhirat kelak.

Permasalahan terkait rendahnya hak inisiatif DPRD dalam mengajukan Raperda yang terjadi di DPRD Kabupaten Lampung Utara ternyata juga terjadi ialah hampir semua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia. Pra anggota DPRD memiliki gejala yang sama, dimana kurang berjalannya fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membuat Peraturan daerah. Indikasi dari hal tersebut adalah nampaknya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kreativitas dan inovasi yang kurang dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sehingga pengajuan Raperda lebih didominasi oleh pihak eksekutif (pemerintah daerah).<sup>11</sup>

Latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas menjadi dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan menitikberatkan kajian

---

<sup>11</sup>Sumber: *Kajian Direktorat Fasulitasi Perancangan Peraturan Daerah* (Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham, 2017), h. 119.

kepada salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni fungsi legislasi. Peneliti hendak meneliti dan mengkaji apakah fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara telah dilakukan secara efektif dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemudian dianalisis menurut persektif *fiqh siyasah*, sehingga kemudian peneliti menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Studi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara)"**.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian skripsi ini adalah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Periode 2014-2019 dalam pembuatan Peraturan Daerah?

2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Periode 2014-2019 dalam pembuatan Peraturan Daerah?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Periode 2014-2019 dalam pembuatan Peraturan Daerah.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Periode 2014-2019 dalam pembuatan Peraturan Daerah.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum tatanegara dan juga sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman

Secara Praktis penelitian ini diharapkan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Serta memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka memperbaiki sistem yang tidak sesuai dengan tata aturan yang ada.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, penelitian yang dilakukan peneliti ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>12</sup> Penelitian harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan di observasikan.

Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai pelaksanaan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Pengambilan data dari tempat yang menjadi objek penelitian langsung yaitu Kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung.

Selain menggunakan penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga mencakup penelitian kepustakaan (*library research*), yang dipakai sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dimana digunakan berbagai literatur (kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu)<sup>13</sup>, yang

---

<sup>12</sup>Kartini Kantono, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Bandung: Madar Maju, 1996), h. 32.

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 38.

relevan dengan masalah pelaksanaan fungsi legislasi angara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kemudian diangkat dan diteliti.

#### **b. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang pada fakta-fakta yang tampak.<sup>14</sup> Jadi jenis penelitian ini berusaha memahami, menafsirkan suatu peristiwa interaksi terkait tingkahlaku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri.<sup>15</sup>

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, berupa sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang ber;angsur serta pengaruh dari sebuah fenomena.<sup>16</sup> Peneliti ingin menguraikan dan menggambarkan apa adanya mengenai pelaksanaan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam tinjauan *fiqh siyasah*.

---

<sup>14</sup>Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), Cet. Ke-8, h.63.

<sup>15</sup>Kartini Kantono, *Pengantar Metodologi...*, h. 78

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 74.

## 2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

Pada penelitian ini penyusun menggunakan dua sumber data, yaitu:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian, yaitu kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau juga sumber lain (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>18</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jurnal, makalah, atau juga penelitian terdahulu yang relavan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>17</sup>E Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI, 2001), Cet.3, h. 29

<sup>18</sup>Suhardi Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Penelitian*(Jakarta: Bumi Aksara,2011), h.76.



### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subyek yang diteliti, populasi disebut juga *univers* tidak lain dari daerah generalisasi yang di wakili oleh sampel.<sup>19</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara periode 2019-2024 yang juga menjabat pada periode 2014-2019 yakni sebanyak 22 orang yang masing-masing berasal dari 8 partai diantaranya adalah sebanyak 3 orang dari partai PKB, 4 Orang dari partai Gerindra, 4 orang dari partai PDI Perjuangan, 3 orang dari partai Golkar, 2 orang dari partai Nasdem, 2 orang dari partai PKS, 2 orang dari partai Demokrat dan 2 orang dari parta Hanura.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pada penelitian ini, penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode *purpose sampling* atau sampel yang *purposive* yaitu sampel yang terpilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel ini terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi.<sup>20</sup> Penetapan kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota dari fraksi yang merupakan inkumben pada periode 2014-2019. Berdasarkan penetapan kriteria ini terdapat 22 anggota

<sup>19</sup>Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian...*, (Jakarta: Logis, 2000), h.83.

<sup>20</sup>Indrawan, Rully dan Poppy yaniarti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitaitaf, dan Campuran* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.93.

DPRD yang diambil sebagai sampel

- 2) Perwakilan dari setiap fraksi yang mengetahui dan memahami terkait dengan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan penetapan kriteria ini diperoleh 10 anggota DPRD sebagai sampel.
- 3) Bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti. Berdasarkan penetapan sampel ini diperoleh sebanyak 8 anggota DPRD kabupaten Lampung Utara sebagai sampel.

Berdasarkan kriteria penetapan sampel di atas, diperoleh 8 sampel penelitian anggota DPRD yang berasal dari masing-masing partai. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2  
Sampel Penelitian

No	Nama	Fraksi	Kode Sampel
1.	Tabrani Rajab	Partai PKB	S <sub>1</sub>
2.	Madri Daud	Partai Gerindra	S <sub>2</sub>
3.	Rahmat Hartono	Partai PDIP	S <sub>3</sub>
4.	Arnol Alam	Partai Golkar	S <sub>4</sub>
5.	H. M. Herry Syarifuddin, S.E., M.M.	Partai Nasdem	S <sub>5</sub>
6.	Agung Utomo	Partai PKS	S <sub>6</sub>
7.	Romli, A.Md.	Partai Demokrat	S <sub>7</sub>
8.	Ali Darmawan	Partai Hanura	S <sub>8</sub>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk Mendapatkan data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan metode dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian

atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, menggunakan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.<sup>21</sup> Metode observasi digunakan untuk mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara dengan kondisi sebenarnya.

Metode pengumpulan data observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipan yaitu observasi yang terlibat dalam kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, selain melakukan pengamatan peneliti ikut merasakan apa yang dirasakan sumber data, dalam observasi partisipan data yang diperoleh akan lebih lengkap.

Observasi partisipan memiliki kelebihan terutama keterpercayaan data dan kelengkapannya karena dikumpulkan dari lingkungan yang alami. Observasi partisipan memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan *observer*, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti. Dengan menggunakan metode observasi ini penyusun dapat menggambarkan secara akurat mengenai pelaksanaan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi sebagian percakapan yang bertujuan

---

<sup>21</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Persada, 2010), h. 38.

memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dua orang atau lebih.<sup>22</sup> Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>23</sup> Dengan metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat sampel untuk digunakan sebagai sumber data penelitian.

Metode wawancara digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi secara akurat tentang pelaksanaan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara, dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Penelitian dilakukan pada saat masa pandemi Covid-19 sehingga hanya terdapat 8 anggota DPRD yang berkenan untuk diwawancara terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal *variable* berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>24</sup> Metode observasi digunakan untuk mencocokkan data yang didapat melalui *interview* dengan keadaan sebenarnya. Adapun

---

<sup>22</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ..., h. 39.

<sup>23</sup>*Ibid.* h. 117.

<sup>24</sup>Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 202.

dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan pelaksanaan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara serta hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.<sup>25</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h.243.

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami.<sup>26</sup>

Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, maupun lisan dari para narasumber atau informan,<sup>27</sup> dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.

Hasil data diperoleh kemudian disusun menggunakan metode pendekatan secara *deduktif* yakni berangkat dari fakta fakta secara umum untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara khusus, selanjutnya penyusun akan membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk kemudian digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir.

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 13, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.335.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 336.



## BAB II

### DPRD DALAM PANDANGAN *FIQH SIYASAH* DAN HUKUM POSITIF

#### A. Landasan Teori

##### 1. DPRD dalam Pandangan *Fiqh Siyasah*

*Fiqh siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan yang kedua adalah *al-siyasi*. Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Secara istilah, menurut ulama ushul, kata *fiqh* berarti mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang di gali dari dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>1</sup>

*Siyasah* secara bahasa memiliki arti mengatur. Sedangkan kata mashdar-nya yaitu *siyasah* itu secara bahasa bermakna bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya.<sup>2</sup>

Adapun pengertian *fiqh siyasah* menurut Abdul Wahab Khalaf adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan semisal perundang-undangan dan berbagai peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.<sup>3</sup>

Kemudian Ahmad Fathi Bahansi menyatakan *siyasah syar'iyah* atau *fiqh siyasah* adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara.<sup>4</sup> Pengertian lain yang semakna adalah apa yang disampaikan Ali Syariati bahwa ia adalah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan

---

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 18.

<sup>2</sup>Ibn Manzhar, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1968), Vol. 6, h. 108.

<sup>3</sup>Ahmad bin Muhammad al-Fayyumî, *al-Mishbah al-Munir* (Kairo: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1986), h. 295.

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 296.

“*khidmah*”, tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan “*islah*”. Kaitannya dengan hal ini, kajian *fiqh siyasah* meliputi pengaturan hubungan sesama warga negara, antara warga negara dengan lembaga negara dan sesama lembaga negara.

Implementasi dari *fiqh siyasah* telah di mulai sejak Rasulullah mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang di ridhoi Allah SWT. Terutama tampak setelah Rasulullah melakukan hijrah. Meskipun demikian bukan berarti bahwa fakta yang sama tidak di temukan ketika Rasulullah masih tinggal di Mekkah, kemudian hal ini di teruskan oleh ke empat khulafa al-rasyidun dan dinasti-dinasti sesudahnya.

Kajian *fiqh siyasah* menggunakan beberapa metode yang biasa dipakai antara lain: *Ijma'*, *qiyas*, *al-Masalihul mursalah*, *shad al-dzari'ah*, *al-ishtisan* dan kaidah-kaidah *fiqh* lainnya. Abd al-Rahman Taj menegaskan bahwa dasar pokok *siyasah* adalah wahyu atau agama. Nilai transendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Sumber-sumber lainnya yang digunakan dalam proses kajian *fiqh siyasah* adalah manusia sendiri dan lingkungannya.

Peraturan-peraturan yang bersumber pada lingkungan manusia sendiri seperti pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia dan warisan budaya perlu di kaitkan dengan nilai dan norma transendental agar tidak bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Allah SWT. seperti yang di tetapkan dalam syariatnya.

Pembahasan lembaga perwakilan dalam sebuah pemerintahan merupakan salah satu dari beberapa hal yang menjadi objek kajian *fiqh siyasah*. Salah satu lembaga perwakilan yang pernah ada dalam perspektif politik dan hukum Islam adalah *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd*. Istilah ini digunakan sebagai lembaga representatif umat yang mempunyai kedudukan di luar area kekuasaan eksekutif.<sup>5</sup>

Dalam *fiqh siyasah* Islam, sebagai mana yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW yaitu membentuk institusi eksekutif dan administratif untuk melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena hal ini terkait dengan pribadi Muhammad SAW sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang kepala Negara.<sup>6</sup>

Melihat hal itu, para ulama *fiqh* telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana *fiqh* Islam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan akibat hukum yang akan terjadi sesuai dengan paradigma politik Islam yang bersifat khusus, yaitu elastis. Hukum yang telah di lontarkan para ulama *fiqh* dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara.<sup>7</sup>

Al-Maududi menyatakan permasalahan kenegaraan harus di putuskan secara bijak, dan pandangan yang tajam sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Para ahli *fiqh siyasah* menyebutkan

---

<sup>5</sup>Umarwan Sutopo, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2000), h. 102.

<sup>6</sup>M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 178.

<sup>7</sup>Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Hukum Islam (Al-Ahkam Sulthaniyyah Wa Wilayatud Diniyyah)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 67.

beberapa alasan pentingnya pelebagaan *syura* (setingkat dengan pemerintah) yakni:<sup>8</sup>

- 1) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin di libatkan untuk di mintai pendapatnya tentang Undang-Undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak untuk musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan Undang-Undang.
- 2) Secara individual rakyat tidak dapat berkumpul dan bermusyawarah secara keseluruhan dalam satu tempat, apalagi terdapat diantara mereka yang tidak memiliki pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis sehingga juga tidak dapat mengemukakan pendapat dalam bermusyawarah.
- 3) Musyawarah hanya dapat di lakukan dengan efektif apabila jumlah pesertanya terbatas, karena apabila musyawarah di lakukan di suatu tempat dengan jumlah seluruh masyarakat, maka musyawarah tidak dapat berjalan dengan baik.
- 4) Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* bisa di lakukan apabila ada lembaga yang menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan masyarakat.
- 5) Kewajiban kepada *ulu al-amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu di pilih oleh suatu lembaga.

---

<sup>8</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 164.

6) Ajaran Islam menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah, dan Nabi Muhammad SAW menekankan dan melaksanakan musyawarah dilakukan dengan para sahabat untuk menentukan kebijakan pemerintah.

**a. Pengertian *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd***

*Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.<sup>9</sup>

Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun *ahl al-Syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang mereka angkat

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 158.

sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.<sup>10</sup>

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl-syura*. pada masa 'Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijakan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang ditunjuk 'Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini *ahl al-Syura* atau *ahl al-hall wa al-'aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara dan pemerintahan.<sup>11</sup>

Berangkat pada praktik yang dilakukan al-Khulaf'aul Rasyidun inilah para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang *ahl al-hall wa al-'aqd*. Menurut mereka, para khalifah tersebut, dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda yaitu, pertama dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi kepala negara, kedua pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (*bay'ah*) umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih, ketiga pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-'aqd*

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid*, h.160.



melalui seleksi dalam masyarakat, keempat pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala.<sup>12</sup>

Ijtihad adalah penggunaan penalaran kritis dan mendalam untuk memahami isi kandungan Alquran dan Sunnah yang merupakan sumber baku agama, untuk memahami dan menafsirkan sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berpikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Al-Mawardi menentukan bahwa syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala negara.<sup>14</sup> Dalam hal ini, al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kandidat yang dianggap paling memenuhi kualifikasi untuk menjadi kepala negara diminta kesediaanya tanpa terpaksa. Bila ia bersedia menjadi kepala negara, maka dimulailah kontrak sosial antara kepala negara dan rakyat yang

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h.164-166.

<sup>13</sup> Hendri k, *pemikiran muhammad iqbal dan pengaruhnya terhadap pembaruan hukum islam*, (jurnal al-,adalah, vol. xii, no. 3, 2015). h. 612.

<sup>14</sup> *Ibid*.

diwakili oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*. Selanjutnya barulah rakyat secara umum menyatakan kesetiaan mereka kepada kepala negara.<sup>15</sup>

pendapat al-Naisaburi, al-Nawawi, dan Muhammad Abduh. al-Naisaburi mengatakan bahwa *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah orang-orang yang terhormat yang berfikir luas. al-Nawawi mengidentikkan sebagai para pemimpin dan tokoh masyarakat. Sementara Abduh, memerinci komponen *ahl al-halwa al-'aqd*, yaitu para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam masalah kemaslahatan umum.<sup>16</sup>

Adapun Hasan al-Banna mengelompokkan *ahl al-hal wa al-'aqd* kedalam tiga golongan, yaitu faqih yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat dan orang yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan.<sup>17</sup>

Dalam sejarah Islam, istilah *ahl al-hall wa al-'aqd* sendiri sebenarnya tidak lahir pada zaman nabi Muhammad SAW ataupun zaman Khulafaur Rasyiddin, lembaga ini baru muncul ketika zaman Abbasiyah atau Bani Abbas yang berpusat di Kota Baghdad (sekarang ibukota Irak), pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *tafsir al-manar*, (kairo: maktabah al-khairah, 1960), jilid 5. h. 181.

<sup>17</sup> Lihat Fathi Osman, "the concept for the appoitmeny of the head of an islamic state", dalam mumtazh ahmad, *state, politic of islam*, (washington: american trust publication, 1986), h. 60-61.

al-Hakam II (961-976 M) membentuk majelis al-Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota majelis syura ini setingkat dengan pemerintahan. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis ini yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara.<sup>18</sup> Jadi, daulat Umayyah II di Spanyol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik islam sejak zaman Mu'awiyah yang berkuasa di Damaskus.

Pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyak permasalahan kenegaraan yang harus diputus secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam.<sup>19</sup>

#### **b. Dasar Hukum *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* dalam Al-Qur'an**

DPRD menurut pandangan Islam disamakan dengan *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* yaitu sebuah lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam atau yang di sebut sebagai khalifah (pemimpin negara).<sup>20</sup>

Lembaga *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* pertama kali di bentuk pada masa akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Umar menunjuk enam

---

<sup>18</sup> Abudul Aziz Dahlan, et at., *insklopedi hukum islam*, (jakarta: ichtiar baru van hoeve, 1995), jilid 4 h. 1063

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 1061

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 1063.

orang sahabat, agar satu orang diantara mereka di angkat sebagai pemimpin negara dengan lima orang sisanya. Dalam perjalanannya lembaga *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* ini tidak ada lagi secara permanen di zaman Ustman, begitujuga di zaman Ali bin Abi thalib keberadaannya semakin kabur. Hal ini di sebabkan situasi politik yang dihadapi Ali pada waktu itu. Lalu pada era dinasti Umayyah dan Abbassiyyah lembaga ini sudah hilang karena corak pemerintahan berubah menjadi kerajaan.<sup>21</sup>

Dasar pembentukan *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* mengacu berdasarkan Al Qur'an dan hadis. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa [4] ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa [4] : 59).<sup>22</sup>

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan kepada seluruh umat muslim untuk mentaati perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu mengandung ajaran bahwa kewajiban taat kepada *Ulil Amri*, *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* itu termasuk dalam *Ulil Amri* dalam melaksanakan pimpinannya harus berpedoman pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-

<sup>21</sup>Umarwan Sutopo, *Fiqh...*, h. 104.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Hikmah Diponegoro, 2011), h. 87.

Qur'an dan ajaran Rasul-Nya dalam sunnah.<sup>23</sup> Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura [42] ayat 38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Asy Syura [42] : 38).<sup>24</sup>

Pembentukan lembaga *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus di putuskan dengan bijak dan pandangan yang tajam. Lembaga perwakilan itu sendiri memang pernah ada pada zaman Rasulullah, bahkan lembaga ini sudah ada pada zaman Islam muncul di Jazirah Arab. Pemikiran di sekitar konsep ini, dapat di jumpai di berbagai tempat, misalnya di Yunani Kuno. Pada zaman itu gagasan tentang suatu pemerintahan Republik atau Demokrasi perwakilan timbul dan selalu hidup di berbagai negara dan kota, dalam rangka menentang pemerintah tiran di dalam negeri, dan dalam melawan despotisme timur yang diwakili oleh Imperium Persia.<sup>25</sup>

### c. Tugas, Fungsi dan Wewenang *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd*

Tugas dan wewenang lembaga perwakilan rakyat dalam Islam secara umum menurut penulis *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* adalah

<sup>23</sup> Abu A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Cet. Ke 1, (Bandung: Mizan, 1990), h. 244.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, h. 487.

<sup>25</sup> Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 90.

*ahlul ikhtiar* dan mereka juga adalah dewan perwakilan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.<sup>26</sup>

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa tugas *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* adalah mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan *baiat in 'iqad* kepada khalifah. Imam Al-Mawardi berkata jika *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* telah berkumpul untuk memilih maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan immamah (khalifah) yang memenuhi seluruh persyaratan. Mereka harus mendahulukan yang banyak kelebihan-nya, yang paling sempurna persyaratan-Nya, dan yang paling segera di taati rakyat, tanpa bergantung pada pembaiatannya.
- 2) *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* melakukan penalaran kreatif (ijtihat) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak

---

<sup>26</sup>Frenki, “*Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam*”, (Satuan Acara Perkuliahan, Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 35.



dijelaskan oleh nash. Disinilah perlu Al-Sulthah Al-Tasyriah tersebut di isi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa, mereka berusaha mencari *ilat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dalam dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Disamping itu, ijtihad anggota legislatif atau *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* harus mengacu pada prinsip *jalb al-mashalih dandaf al-malfasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan) ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil perturan yang akan di undangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.<sup>27</sup>

Ulil amri termasuk dalamnya *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* memiliki enam macam tugas sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Bidang Keagamaan meliputi:
  - a) Mengembangkan ilmu-ilmu agama
  - b) Menghormati ahli-ahli ilmu agama.
  - c) Meminta pandangan para ahli agama dalam soal hukum dalam menyangkut masalah kegamaan.
  - d) Memberantas *bid'ah* dan mengambil tindakan undang-undang sesuai hukum yang berlaku terhadap orang yang mengamalkannya untuk memelihara agama dari pada kecacatan

---

<sup>27</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah fi Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah*, (al-Qahirah: Mathaba'ah al-Taquddum, 1397 H/1977 M), h. 59.

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh...*, h. 168-170.

dan melindungi umat Islam dari kesesatan.

- e) Mendukung tegaknya syariat-syariat Islam, misalnya memberikan dukungan untuk dikumandangkannya adzan dan *iqomad* di berbagai masjid dan mushola sebagai menandakan telah masuknya shalat lima waktu.
  - f) Menjadi imam shalat.
  - g) Menyampaikan khotbah.
  - h) Menentukan permulaan awal dan akhir pelaksanaan ibadah puasa.
  - i) Menyediakan kemudahan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
- 2) Dalam bidang pertahanan meliputi:
- a) Berijtihad menentang kaum Musyrikin yang memusuhi Islam.
  - b) Memerangi pemberontakan dan membentuk angkatan bersenjata yang tangguh termasuk menetapkan gaji dan tunjangan yang memadai, sehingga para tentara yang bergabung dalam angkatan bersenjata itu dapat hidup layak dengan gaji yang di terimanya.
- 3) Bidang kehakiman meliputi:
- a) Menegakkan keadilan dan menumpas kezaliman.
  - b) Melaksanakan *hudud* (hukum) syari'ah agar segala larangan Allah tidak di perolok-olok dan hak-hak manusia tidak di langgar.

- c) Memisahkan kekuasaan eksekutif dari pada kekuasaan yudikatif dengan melantik dan hakim yang mampu mengemban tugas agar mencegah tidak terjadinya pertikaian dan kedzaliman sehingga semua pihak, baik pihak yang kuat maupun pihak yang lemah, ataupun pihak yang hina maupun pihak yang mulia memiliki kedudukan setara di mata hukum.
- 4) Bidang keuangan meliputi:
  - a) Memungut dan mendistribusikan zakat, *jizyah*, *fai*, dan *kharaj*.
  - b) Memberi perhatian kepada harta-harta yang di wakafkan untuk tujuan kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 5) Bidang pemerintahan negara meliputi:
  - a) Memilih mereka yang layak untuk melakukan tugas-tugas yang ada kaitannya dengan kaum Muslimin dan orang banyak. Sehingga tugas yang di percayakan kepadanya dapat dilakukan dengan baik.
  - b) Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan umat, sehingga dapat segera diketahui jika ada pihak-pihak tertentu melakukan penghianatan atau penipuan.<sup>29</sup>

Hampir senada dengan pendapat al-Anbari, al-Mawardi menyatakan tugas ulil amri yang termasuk dalamnya *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* ada sepuluh macam yaitu:

- 1) Mempertahankan dan memelihara agama

---

<sup>29</sup>Abd al-Wahhab Abd al-Aziz al Syisyani, *Huquq al-Insan wa Hurriyatuh al-Assasiyah fi al- Nizam al- Islami wa al- Nuzhum al- Mu'ashirah*, (Beirut: Al Maktababah, 1988M), h. 611.

- 2) Menegakkan hukum-hukum dan keadilan pada pihak-pihak yang berperkara.
- 3) Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman, baik jiwa maupun hartanya.
- 4) Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum tuhan.
- 5) Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
- 6) Melaksanakan jihad untuk menghadapi pihak-pihak yang menghadapi Islam.
- 7) Memungut zakat, dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan.
- 8) Mengatur penggunaan harta *bayt al-mal* (kas negara) secara efektif.
- 9) Melantik orang yang jujur dan berkualitas guna mengurus dan menjaga keuangan negara.
- 10) Memantau pekerjaan dalam rangka membangun negara dan menjaga agama.<sup>30</sup>

Berdasarkan pandangan-pandangan para pakar hukum tata negara dalam Islam tersebut di atas dapat penulis tegaskan bahwa tugas pokok *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* adalah mencalonkan dan memilih Khalifah serta mengawasi segala kebijakan sesuai dengan syariat Islam, mensejahterakan rakyat dan menjalankan kebijakan pemerintah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan terkait fungsi legislasi maka hal tersebut termasuk kedalam kewenangan dari *Ahl Al-Hall wa Al-*

---

<sup>30</sup>Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Hukum Islam (Al-Ahkam Sulthaniyyah Wa Wilayatud Diniyyah)* (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), h. 10.

*Aqd* sebagaimana dijelaskan pada poin dibawah ini.

Kewenangan kelembagaan negara legislatif yang dalam hal ini *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* adalah:

- 1) Memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi dalam menentukan kebijakannya.
- 2) Kewenangan di bidang perundang-undangan meliputi:
  - a) Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal tidak di atur secara tegas oleh Al-Qur'an dan hadis.
  - b) Memutuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang memiliki penafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat.
  - c) Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam syariat, selama tidak bertentangan dengan jiwa dengan semangat syariat.
- 3) Memilih dan membai'at khalifah. *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* berwenang memilih dan membai'at khalifah yang tugasnya meminta pertanggung jawaban khalifah.
- 4) Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah. *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* mempunyai wewenang untuk mengontrol khalifah, atas seluruh tindakan yang terjadi secara ril dalam

negara.<sup>31</sup>

Tugas dan wewenang *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* sebagaimana diuraikan di atas jika dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, niscaya akan selalu terpelihara hubungan baik vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Terpelihara dengan baik kedua macam hubungan ini merupakan karakteristik pemerintahan dalam Islam yang beriman dan bertakwa serta bertanggung jawab kepada Allah SWT dan kepada rakyat yang berada di bawah kekuasaannya.

## 2. DPRD dalam Hukum Positif

### a. Pengertian DPRD

Esensi pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia 1945 beserta penjelasan pasal berikut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan rakyat daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Atas dasar prinsip normatif demikian dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa Dewan Perwakilan rakyat

---

<sup>31</sup>Frenki "Sistem Politik Dan Ketatanegaraan Islam" ..., h, 9-10.

Daerah yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat.<sup>32</sup>

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) undang-undang Nomor. 5 tahun 1974, dewan perwakilan rakyat daerah adalah salah satu alat daerah di samping kepala daerah. Di dalam penjelasan Umum Undang-undang tersebut diterangkan bahwa:

“Kontruksi yang demikian ini menjamin kerja sama yang serasi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. Dengan demikian maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Kepala Daerah memimpin di bidang Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bergerak dalam bidang Legislatif.”<sup>33</sup>

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

DPRD adalah lembaga *legislate* atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang di buatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat di katakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan

---

<sup>32</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemetintah Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 65.

<sup>33</sup>Josef Riwu Kaho, *Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 77.



kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang di singkat DPRD Kabupaten adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten.<sup>34</sup>

DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Seajar dan menjadi mitra memiliki arti bahwa DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan transparan dalam rangka memberikan pelayanan

---

<sup>34</sup>Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 249.

sebaik-baiknya kepada masyarakat demi terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

**b. Kedudukan dan Fungsi DPRD**

**1) Kedudukan DPRD**

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal yang sama terdapat pada kedudukan DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 341 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum dan Pasal 342 menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan pasal 363 dan 364 UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang di

pilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Kedudukan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.<sup>35</sup>

Berdasarkan pasal 148 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

## **2) Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berdasarkan fungsi tersebut DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a) Membentuk perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah

---

<sup>35</sup>UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kabupaten/Kota.

<sup>36</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemetintah...*, h. 67.

APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
- e) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
- j) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- k) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 67.

Perwujudan dari fungsi Badan Legislatif Daerah, seperti hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak prakarsa, hak penyelidikan menjadi modal besar dalam menghadapi kekuasaan pemerintah. Dalam tatanan tersebut kekuasaan Badan eksekutif menjadi lemah dibandingkan kekuasaan badan legislatif. Kekuasaan badan legislatif dan kekuasaan badan eksekutif terjadi ketidakseimbangan antar kekuasaan.<sup>38</sup>

Adapun fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sama dengan fungsi DPR-RI yang mencakup tiga hal yaitu : fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan.

- a) Fungsi legislasi, yakni menyusun peraturan-peraturan daerah baik dengan inisiatif mandiri ataupun bersama Pemerintah Daerah (Pemda).
- b) Fungsi Anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RAPBD, dalam bentuk refleksi rencana program pemerintah daerah dalam bentuk angka.
- c) Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Perda dan Keputusan Kepala Daerah untuk memastikan berjalannya peraturan yang ada dalam kerangka optimalnya kinerja pemerintah daerah.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 68.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat disimpulkan bahwa fungsi DPRD secara umum ada tiga, yaitu:

a) Fungsi Legislasi

Hubungan antara pemerintahan daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.<sup>40</sup>

Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang. Badan legislatif di beri hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama di bidang *budget* atau anggaran. Mengontrol badan eksekutif, dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan, dalam menyelenggarakan tugas ini, badan

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 69.

eksekutif perwakilan rakyat di beri hak-hak kontrol khusus, seperti hak bertanya, interpelasi, angket, mosi.<sup>41</sup>

b) Fungsi Anggaran

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang di biayai uang publik. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Pemerintah daerah perlu memiliki komitmen bahwa anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif, dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai strategi yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b di

---

<sup>41</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Bagian Kelima Paragraf Kedua Kedudukan dan Fungsi DPRD. Pasal 41.

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 5.



laksanakan sesuai dengan Undang-Undang.<sup>44</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan lembaga Pemerintahan daerah atau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah. Para anggota DPRD dipilih berdasarkan pemilihan umum setiap 5 (lima) Tahun sekali berdasarkan usulan dari masing-masing partai politik.

#### c) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan muncul ketika trias politika memisahkan kekuasaan menjadi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.<sup>45</sup> Dengan adanya pemisahan tersebut, muncul fungsi di setiap masing-masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.<sup>46</sup>

Pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terdapat dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>44</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 8.

<sup>45</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa media, 2009), h. 382.

<sup>46</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemetintah...*, h. 70.

Daerah adalah melaksanakan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.<sup>47</sup>

Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hanya yang harus diingat adalah pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang memiliki untuk menghukum lembaga eksekutif tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.<sup>48</sup>

### c. Tugas dan Wewenang DPRD

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tugas:

- 1) Membentuk peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Bupati,
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Bupati.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Bupati dan/atau Wakil Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri

---

<sup>47</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 78.

<sup>48</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan politik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gramedia Widiasama Indonesia, 2007), h. 208.

melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.

- 5) Memilih wakil Bupati/Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Bupati.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- 9) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- 10) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 11) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- 12) Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Kewenangan DPRD Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008

Undang-Undang tersebut telah melimpahkan kekuasaan baik secara

---

<sup>49</sup>Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 366 ayat (1).

politik maupun secara administratif kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah selain 6 (enam) kewenangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, agama, pertahanan, keamanan, dan yudisial. Pelimpahan kewenangan itulah yang dinamakan dengan “otonomi daerah”. Pelimpahan itu secara otomatis juga memindahkan fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak hanya di monopoli oleh pemerintah pusat seperti di era sentralisasi namun telah terdistribusi ke daerah.

Pelimpahan kewenangan itu di sertai pula dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi Dewan Perwakilan Rakyat/DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, *budgeting* dan *controlling*, karena diharapkan dengan “Otonomi Daerah” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD mampu meningkatkan peran pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah.<sup>50</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian secara lebih lanjut penulis telah melakukan penelaahan karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya kajian ialah untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang

---

<sup>50</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemetintah...*, h. 71-72.

sama dengan penelitian yang lain. Adapun tinjauan pustaka akan peneliti gunakan dalam mendukung penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Anindita Dwi Hapsari, S.H. tahun 2018 dengan judul *“Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan Perda Kabupaten Lampung Utara Periode 2014-2019)”*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Maka, dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Perda berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa DPRD Kabupaten Lampung Utara belum dapat menjalankan fungsi legislasinya dengan optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya usulan/inisiatif rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara yang berasal dari DPRD pada periode 2009-2014 serta periode 2014-2019. Serta perbandingan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lampung Utara dengan DPRD di beberapa daerah lainnya pun sama belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Selama ini fungsi legislasi sering dilaksanakan dalam mekanisme konvensional yang masih cenderung mirip dengan apa yang dilakukan sebelum pelaksanaan otonomi luas, yaitu bergerak pasif. Dalam pembentukan perda Kabupaten Lampung Utara, DPRD

sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun sangat disayangkan DPRD Kabupaten Lampung Utara belum mempunyai perda tersendiri untuk mengatur produk hukum daerahnya (Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) dan kendala lainnya adalah dalam proses pembentukan perda.<sup>51</sup>

Kedua, skripsi karya Nur Rahma Diyani tahun 2019 berjudul *“Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”*. Jenis penelitian pada skripsi ini ada penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, bersifat deskriptif. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder sebagai sumber yang utama. Hasil penelitian data-data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari *siyasah dusturiyah* maka lembaga legislatif merupakan lembaga Negara yang berkedudukan strategis dalam sistem pemerintahan. Lembaga legislative memiliki peran yang sama dengan lembaga syura dalam Islam. Dimana keduanya memiliki peran yang sama yakni memusyawarahkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pemerintahan. Selain bertugas memusyawarkan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, lembaga

---

<sup>51</sup>Anindita Dwi Hapsari, S.H. tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019)“, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2018, h. vii.

legislatif juga memiliki wewenang dalam mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan ummat.<sup>52</sup>

Ketiga, skripsi karya Umi Ma'rifatun yang berjudul “Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif *Fiqh siyasah*”. Fokus kajian dalam skripsi ini lebih menganalisis tentang kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan metode analisis data deskriptif normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, kedudukan DPR RI memiliki kesamaan dengan *Ahlu Al-Hall wa Al Aqd*. Dimana memiliki kewenangan yang sama dalam hal pembentukan undang-undnag, pengawasan dan juga wewenang dalam memilih pemimpin.<sup>53</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun persamaannya adalah penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis peran lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan, pembeda antara penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti lebih spesifik dan berfokus kepada fungsi legislatif DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pembuatan Peraturan Daerah yang kemudian dikaji dari perspektif *fiqh siyasah*.

Penulis juga mempergunakan literatur terkait seperti buku-buku tentang *fiqh siyasah*, buku terkait dengan peran Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>52</sup>Nur Rahma Diyani “Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*”. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tahun 2019, h. vii.

<sup>53</sup>Umi Ma'rifatun yang berjudul “Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif *Fiqh siyasah*”. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah tahun 2019, h. vii.



Daerah (DPRD), serta buku yang terkait dengan metode penelitian kualitatif. Diantara buku-buku yang penulis gunakan adalah: *Fiqh siyasah* karya Ahmad Dzajuli, *Legislasi Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* karya W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Memahami Ilmu Politik* karya Ahmad Subekti, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)* karya Sadu Wasistisno dan Yonanta Wiyono, *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD* karya Bambang Yudhoyono, dan masih banyak buku yang dipergunakan untuk menunjang penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an Al-Karim

### B. Buku

Abu A'la Al Maududi. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*. Cet. Ke-1. Bandung: Mizan. 1990.

Abu Husain Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Bandung: Dahlan. 1997.

A. Djazuli. *Fiqh siyasah*. Jakarta: Prenada Media. 2000.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bandung. Cet. 1. 2004.

Abudul Aziz Dahlan, et at., *insklopedi hukum islam*. Jakarta: ihtiar baru van hoeve, 1995.

Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Hukum Islam (Al-Ahkam Sulthaniyyah Wa Wilayatud Diniyyah)*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.

Ahmad bin Muhammad al-Fayyumî. *al-Mishbah al-Munir*. Kairo: al-Maktabah al-Ilmiyyah. 1986.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1991.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.

Bambang Yudhoyono. 2000. *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Al-Hikmah Diponegoro. 2011.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jilid 4 Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2011.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Persada. 2010.

- Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Cet. Ke-8. 1998.
- Ibn Manzhur. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Shadir. 1968.
- Iqbal. Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing. 2006.
- Josef Riwu Kaho. *Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Sosial*. Bandung: Madar Maju. 1996.
- Kristi Poerwandari. *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi. LPSP3 UI. Cet.3. 2001.
- Nur, Suhardi. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Miriam Budiardjo. *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*. Bandung: Mizan. 1998.
- Muhammad Rasyid Ridha, *tafsir al-manar*, kairo: maktabah al-khairah, 1960.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan politik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Cet. Ke- 2. Jakarta: Gramedia Widiasama Indonesia. 2007.
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Fathi Osman, “the concept for the appoitmeny of the head of an islamic state”, dalam mumtazh ahmad, *state, politic of islam, washington: american trust publication*, 1986.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013.
- Subakti Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Press. 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet. 13. 2011.

Rahardjo, Dawam. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina. 2002.

Siswanto Sunarno. *Hukum Pemetintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Susiadi, AS. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.

Tim Penyusun. *Panduan Penulisan Skripsi*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung. 2019.

Sutopo, Umarwan. *Fiqh siyasah*. Jakarta: Rhineka Cipta. 2000.

Wasistisno, Sadu dan Yonanta Wiyono. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia. 2009.

W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono. *Legislasi Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. 2009.

Wahbah al-Zuhayli. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr. 2001.

### C. Jurnal/Karya Ilmiah

Anindita Dwi Hapsari, S.H. tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019)“, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2018, h. vii.

Dedi Suwardi “Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD (Studi di Kabupaten Lampung Utara)“, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung tahun 2018, h. vii.

Meri Yani, S.H., M.H. berjudul “Fungsi Legislasi dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi Kasus DPRD Kota Jambi dan DPRD Kab Muaro Jambi)“. Tesis Fakultas Hukum Universitas Jambi taun 2019, h. vii

Hendri k, pemikiran muhammad iqbal dan pengaruhnya terhadap pembaruan hukum islam, (jurnal al-„adalah, vol. xii, no. 3, 2015). h. 612.

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomo 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.



## E. Wawancara

Agung Utomo., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi PKS, Wawancara dengan penulis via telepon, Kotabumi Lampung Utara pada 29 April 2020.

Ali Darmawan., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Hanura, Wawancara dengan penulis via telepon, Kotabumi Lampung Utara pada 29 April 2020

Arnol Alam, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Golkar, Wawancara dengan penulis penulis via telepon, Kotabumi Lampung Utara pada 29 April 2020.

H. M. Herry Syarifuddin, S.E., M.M., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Nasdem, Wawancara dengan penulis via telepon, Kotabumi Lampung Utara pada 29 April 2020.

Madri Daud, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Gerindra, Wawancara dengan penulis penulis via telepon, Kotabumi Lampung Utara pada 29 April 2020.

Rahmat Hartono, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi PDIP, Wawancara dengan penulis penulis via telepon, Kotabumi Lampung Utara pada 29 April 2020.

Romli, A.Md, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Demokrat, Wawancara dengan penulis via telepon, Kotabumi Lampung Utara pada 29 April 2020.

Tabrani Rajab, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi PKB, Wawancara dengan penulis via telepon, Kotabumi Lampung Utara pada 29 April 2020.

## F. Media Online

Situs resmi Kabupaten Lampung Utara <http://lampungutarakab.go.id> diakses pada 29 Mei 2020 pukul 21.30 WIB.

Sutopo, Umarwan, *Fiqh siyasah* dan Ahl Al-Hall wa Al-Aqdi, diakses pada tanggal 24 Mei 2020. <https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2015/09/10/77819/fiqh-siyasah-dan-penerapan-ahlu-al-halli-wal-aqdi.html>.